

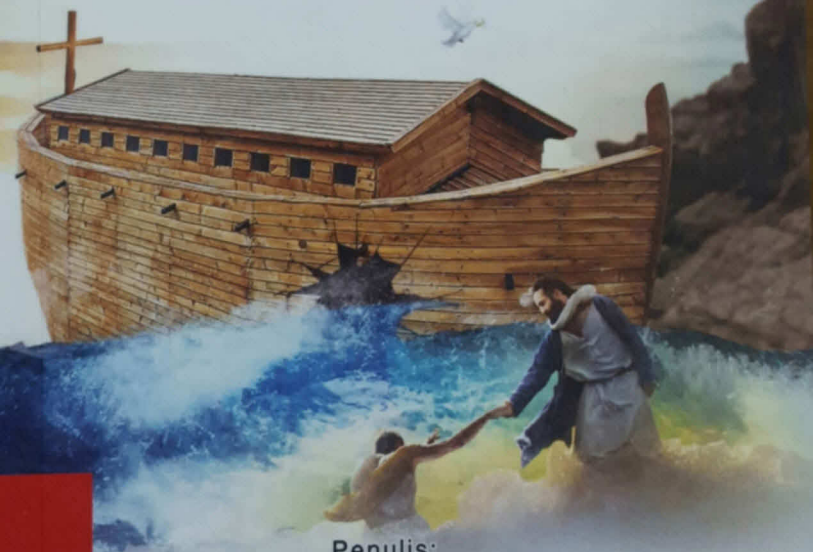


SERI TEOLOGI DRIYARKARA 06

OBOR

# GEREJA

## BAHTERA YANG MULAI BOCOR?



Penulis:

**RP DHANIEL WHISNU BINTORO CICM, dkk**



SERI TEOLOGI DRIYARKARA 06

# GEREJA

## BAHTERA YANG MULAI BOCOR?

Penulis:

RP DHANIEL WHISNU BINTORO CICM, *dkk*

  
OBOR

**GEREJA****BAHTERA YANG  
MULAI BOCOR?**

Penulis:

RP Dhaniel Whisnu Bintoro CICIM, dkk

• Dr. Josep Ferry Susanto • Dr. Andreas B. Atawolo

• Dr. Fransiskus Sule • Prof. Dr. A. Eddy Kristiyanto

• Antonius Baur, Lic. Th. • Alfonsus Widhi, Lic. Th.

• C.B. Putranto, Lic. Th. • Dr. Berliana Ali

• Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno • Y. Purbo Tamtomo, LIC)

© STF Driyarkara

**PENERBIT OBOR**

Anggota IKAPI – Ikatan Penerbit Indonesia

Anggota SEKSAMA – Sekretariat Bersama

Penerbit Katolik Indonesia

Jl. Gunung Sahari 91 – Jakarta 10610

• Telp.: (021) 422 2396 (hunting) • Fax.: (021) 421 9054

• WhatsApp: 0821 1415 6000/0811 8000 344

• E-mail: penerbit@obormedia.com

• Website: www.obormedia.com

Cet. 1 – Januari 2023

Editor – RP Dhaniel Whisnu Bintoro CICIM

Desain Sampul – Antoni Lewar

Desain Isi – Markus M

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit OBOR.Nihil Obstat : Antonius Eddy Kristiyanto OFM  
Jakarta, 5 Januari 2023Imprimatur : RD Yohanes Suparta  
Vikjen Keuskupan Bogor  
Bogor, 18 Januari 2023

ISBN 978-979-565-936-5

**DAFTAR ISI**

Pengantar Editor.....	vii
<b>Gereja yang Rapuh dalam Figur Petrus</b> Dr. Josep Ferry Susanto .....	1
<b>GEREJA: KOMUNITAS PEZIARAH</b> Dr. Andreas B. Atawolo .....	27
<b>MEMAKNAI KEMATIAN GEREJA</b> Dr. Fransiskus Sule .....	45
<b>LIMA BAHKAN ENAM LUKA GEREJA</b> Prof. Dr. A. Eddy Kristiyanto .....	59
<b>TUBUH RAPUH GEREJA</b> Antonius Baur, Lic. Th. ....	69
<b>KEHIDUPAN DAN KEMATIAN DI BALIK JUBAH RELIGIUS</b> Alfonsus Widhi, Lic. Th. ....	91
<b>BAHTERA DAN EKARISTI: IMAN DALAM RISIKO KEBERTUBUHAN</b> C.B. Putranto, Lic. Th. ....	119
<b>KONSILI VATICAN II DAN POLEMIC PENAFSIRANNYA</b> Dhaniel Whisnu Bintoro, Lic. Th. ....	131
<b>MILIK BERSAMA: IDEAL ATAU KENYATAAN?</b> Dr. Berliana Ali .....	161
<b>JALAN SINODAL GEREJA JERMAN: REFORMASI (PROTESTAN) KEDUA?</b> Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno .....	171
<b>GEREJA YANG KUDUS?</b> Y. Purbo Tamtomo, LIC .....	193

# JALAN SINODAL GEREJA JERMAN: REFORMASI (PROTESTAN) KEDUA?

~ Prof. Dr. Franz Magnis-Suseno ~

## Abstrak

*Tulisan ini membicarakan Jalan Sinodal yang sedang ditempuh oleh Gereja Katolik Jerman. Dengan Jalan Sinodal yang dipimpin oleh para uskup Jerman ini, Gereja Jerman mau menanggapi situasi gawat sesudah pecahnya skandal pelecehan seksual oleh imam-imam serta rohaniwan-rohaniwan terhadap anak kecil dan orang muda. Karena skandal itu, Gereja Katolik semakin kehilangan kepercayaan. Jumlah orang yang meninggalkan Gereja naik tajam. Dengan Jalan Sinodal, Gereja Katolik Jerman mau berusaha agar pemakluman Kabar Gembira dapat dipercayai lagi. Namun, hal itu hanya dianggap mungkin apabila Gereja Katolik bersedia melakukan pembaruan-pembaruan radikal. Ada empat hal yang kiranya akan menjadi tuntutan Jalan Sinodal: agar kaum awam diberi lebih banyak pengaruh atas pemilihan para uskup mereka; agar imamat dibuka juga bagi orang yang hidup dalam pernikahan; agar kaum perempuan diizinkan untuk ditahbiskan menjadi imam; dan agar etika seksual Gereja diperbarui serta kasih seksual antarorang sejenis tidak lagi dicap dosa. Tulisan ini mengangkat reaksi tajam sekian pihak dalam Gereja terhadap Jalan Sinodal Jerman itu, mengevaluasi tuntutan-tuntutan Jalan Sinodal Jerman, dan mencoba memperkirakan apa yang akan terjadi dalam Gereja.*

## Heboh dalam Gereja Katolik?

Pada 13 April 2022, sebuah berita menimbulkan heboh cukup besar tidak hanya dalam media Katolik. Dalam suatu surat yang diberi judul "*a fraternal letter of concern*" dan yang ditandatangani oleh lebih dari 70 uskup Katolik—di antaranya beberapa kardinal, kebanyakan dari Amerika Serikat dan Tanzania di Afrika—para penulis menanggapi "Jalan Sinodal" yang sedang dijalani oleh Gereja Katolik Jerman. Surat itu mengkritik bahwa Jalan Sinodal telah menuntut "perubahan-perubahan fundamental" dalam ajaran Gereja, khususnya tentang seksualitas, pemberkatan hubungan antara orang-orang homoseksual, dan tahbisan imam bagi perempuan. Menurut mereka, Jalan Sinodal lebih terinspirasi oleh analisis-analisis sosiologis serta ideologi-ideologi seperti jenderisme daripada oleh Roh Kudus dan Injil. Mereka mengungkapkan kekhawatiran bahwa Jalan Sinodal dapat menyebabkan suatu perpecahan dalam Gereja Katolik.

Surat ini, yang katanya sekarang sudah ditandatangani oleh lebih dari 80 uskup, bukanlah peringatan yang pertama. Pada 22 Februari 2022, Uskup Agung Stanislaw Gadecki, Ketua Konferensi Uskup Polandia, telah mengirim surat kepada Mgr. Georg Bätzing, Ketua Konferensi Uskup Jerman. Di dalam surat tersebut ia dengan cukup keras memperingatkan *Jalan Sinodal Jerman* untuk tidak mencari kebenaran di luar Injil. Gereja Jerman diperingatkan jangan "mengurangi tuntutan-tuntutan using", jangan "mengikuti tekanan dunia dan kebudayaan zaman sekarang", dan jangan percaya pada *infallibilitas ilmu-ilmu sosial* karena itu dapat menghasilkan "korupsi moral dan spiritual".

Kurang dari sebulan kemudian, pada 10 Maret 2022, uskup-uskup Eropa Utara (Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia) juga menulis surat kepada Mgr. Bätzing, di mana mereka mengungkapkan keragu-raguan mereka terhadap arah perbaruan Jalan Sinodal Gereja Katolik Jerman. Mereka

menulis bahwa mereka mengkhawatirkan "arah, metode, dan isi Jalan Sinodal Gereja di Jerman". Menurut mereka, pencarian jawaban atas sekian hal yang mulai dipertanyakan dalam Gereja Katolik tidak boleh sampai memasuki "masalah-masalah yang menyangkut bagian-bagian ajaran Gereja yang tidak dapat berubah". Reformasi Gereja yang benar berarti "membela dan menjelaskan ajaran Gereja serta mengubahnya menjadi cara kehidupan yang meyakinkan", bukan "mengikuti semangat zaman". Kehidupan Gereja tidak dapat diberikan semangat baru dengan mempermiskinkan ajarannya.

Di Roma, tentu Jalan Sinodal Jerman juga dilihat dengan rasa waswas. Pada 2019 silam, Paus Fransiskus sudah mengingatkan umat Katolik Jerman supaya jangan mengambil jalan tersendiri, terpisah dari Gereja universal.

Sebelum memasuki apa yang sedang dibicarakan dalam Jalan Sinodal Jerman itu, mari kita melihat dahulu apa yang menjadi latar belakang Jalan Sinodal itu.

## Konsili Vatikan II: Reformasi Setengah-Setengah

Kita sebaiknya mulai dengan Konsili Vatikan II (1962–1965); suatu konsili yang luar biasa. Adalah Paus Yohanes XXIII, paus yang waktu dipilih sudah berumur tua dan diharapkan menjadi sekadar paus transisi sesudah sosok luar biasa Paus Pius XII, yang setahun sesudah ia menduduki kursi Santo Petrus, mengejutkan Gereja Katolik dengan rencana mengadakan suatu konsili. Dalam hal ini, konsili tersebut akan menjadi yang pertama sejak Konsili Vatikan I (1869–1870), yang waktu itu memberikan kedudukan begitu tak tersentuh kepada paus, sehingga banyak orang mengira bahwa suatu konsili tidak akan perlu lagi. *Curia Romana* (aparatus kepausan) kemudian disuruh mempersiapkan konsili baru itu. *Curia Romana* lalu mempersiapkan seabrik dokumen yang tinggal disahkan oleh

para uskup dalam konsili sehingga akan menjamin bahwa Gereja tidak diganggu oleh pikiran-pikiran modernistik dan lain-lain.

Akan tetapi, ternyata yang terjadi adalah sesuatu yang lain. Dengan persetujuan Paus Yohanes, dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh *Curia* mentah-mentah ditolak oleh uskup-uskup (di mana salah satu teolog yang paling berpengaruh dalam menasihati uskup-uskup konsili adalah Joseph Ratzinger). Mereka kemudian menghasilkan suatu pembaruan luar biasa. Di satu pihak Gereja akhirnya membuka diri terhadap dunia. Dalam *Gaudium et Spes*, cita-cita etika kemanusiaan pascatradisional, seperti demokrasi, perdamaian, hak-hak asasi manusia, dan keadilan sosial dirangkul Gereja. Selain itu, Gereja Katolik menyatakan sikap positifnya terhadap Gereja-Gereja lain dan secara resmi menyatakan bahwa keselamatan Ilahi ditawarkan kepada semua orang, juga kepada mereka yang tidak dibaptis; bahwa dalam agama-agama lain terdapat "yang benar dan suci"; serta bahwa kebebasan suara hati dan kebebasan beragama wajib dihormati Gereja (*Lumen Gentium* 16).

Di lain pihak, ada juga yang macet, yaitu pembaruan Gereja ke dalam. Ajaran Konsili tentang Gereja, tentang kaum awam, dan tentang kolegialitas para uskup memang memang sebenarnya diharapkan membawa perubahan dalam Gereja Katolik. Namun, sejak masa Paus Paulus VI, para paus dengan tegas mencegah segala perubahan praktis. Selibat, misalnya, bahkan tidak boleh dibicarakan. Kedudukan paus sebagai raja berkuasa Gereja Katolik mutlak tetap dipertahankan.

Korban pertama adalah Gereja Belanda, suatu Gereja vital yang mengirim misionaris ke seluruh dunia. Gereja Belanda menyambut konsili dengan gembira. Yang terkenal adalah "Katekismus Belanda", di mana ajaran Gereja diberi rumusan yang "zamani". Akan tetapi, segala harapan perubahan Gereja Belanda ditolak oleh Roma; Katekismus Belanda dilarang, uskup-

uskup yang terbuka diganti dengan uskup-uskup "konservatif". Gereja Belanda pun betul-betul mati. Banyak imam meninggalkan imamat, panggilan-panggilan mengering. Banyak umat tidak lagi ke gereja. Sekarang dari Katolik Belanda tinggal sisa kecil saja.

Di sini juga dapat disebut tentang Ensiklik *Humanae Vitae* (1968) dari Paus Paulus VI, yang juga dijuluki "ensiklik pil *anti-baby*". *Humanae Vitae* ini—dengan mengabaikan hasil pertimbangan komisi yang khusus diangkat untuk masalah pembatasan kelahiran, yang dipimpin oleh Kardinal Döpfner—melarang semua metode pembatasan kelahiran (kecuali dengan cara tidak melakukan hubungan seks pada masa istri sedang subur). Ensiklik itu menghasilkan sesuatu yang dalam Gereja Katolik belum pernah terjadi sejak ratusan tahun, yaitu bahwa suatu ajaran resmi, ajaran paus sendiri, diabaikan begitu saja oleh sebagian besar umat Katolik. Sejak *Humanae Vitae*, wibawa paus dalam Gereja Katolik mulai ambrol.

### Dari Sinode Würzburg sampai ke Jalan Sinodal

Dengan tujuan membuat nyata ajaran Konsili Vatikan II, Konferensi para Uskup Jerman mengumpulkan suatu sinode Gereja Katolik Jerman di Würzburg dari 1971 sampai 1975. Dibantu oleh teolog-teolog Jerman ternama, seperti Karl Rahner dan Johann Baptist Metz—namun Joseph Ratzinger, waktu itu guru besar teologi di Regensburg yang uskupnya, Rudolf Graber, menentang Sinode Würzburg, tidak mau ikut—terjadi proses komunikasi Gereja Jerman yang luar biasa. Namun, sinode itu begitu saja diabaikan oleh Roma, sehingga akhirnya hasil-hasil sinode itu tenggelam, kecuali bahwa mulai terbentuk suatu cara komunikasi baru dalam Gereja Jerman, yang lebih terbuka dan positif, antara para uskup, imam, rohaniwan, biarawan/wati, dan kaum awam. Dari Jerman, Roma dan Vatikan semakin kelihatan bukan sebagai tempat Roh Tuhan, melainkan sebagai lembaga yang mau mempertahankan kekuasaannya.

Syok yang mengguncangkan Gereja Katolik Jerman—dan sementara ini sudah terjadi dalam Gereja Katolik di semakin banyak negara di dunia—adalah skandal pelecehan seksual yang dilakukan oleh aparat Gereja, terutama oleh imam-imam tertahbis, terhadap anak muda dan orang-orang rentan. Di Jerman, skandal itu dibuka oleh Pater Klaus Mertes SJ. Sebagai Rektor Kolese Kanisius di Berlin, ia menulis surat kepada semua alumni agar mereka yang pernah menjadi korban pelecehan oleh aparat Kolese Kanisius melaporkan diri. Jawaban tidak tersangka. Ternyata puluhan bekas murid melaporkan bahwa mereka pernah mengalami pelecehan seksual dari tangan seorang guru, baik Yesuit maupun awam. Bahwa ada sesuatu yang *deeply* tidak beres dalam Gereja Katolik—dan tidak hanya dalam Gereja Katolik—sebenarnya sudah mulai tercium sejak akhir milenium kedua. Kardinal Joseph Ratzinger sebagai Prefek Kongregasi Ajaran Iman, dan sejak 2005 sebagai Paus Benediktus XVI, sangat berjasa dengan mulai menangani kasus-kasus seperti itu. Misalnya, kasus Kardinal Hans Hermann Groër dari Wina, atau kasus pendiri kongregasi *The Legionaries of Christ* Marcial Maciel. Mulailah kasus-kasus yang semakin mengerikan muncul ke permukaan. Misalnya, kasus rumah-rumah yatim piatu di Irlandia (dan baru saja asrama-asrama bagi anak-anak Indian di Kanada, kebanyakan dijalankan oleh suster-suster).

Skandal itu meledak terus di Jerman dan di banyak negara lain, misalnya di Chile. Baik di keuskupan-keuskupan maupun di sekian lembaga Katolik, orang yang menjadi korban angkat bicara. Dalam kasus-kasus yang belum kedaluwarsa (menurut hukum pidana Jerman) jaksa-jaksa membuka perkara kriminal. Pelecehan seksual memang merupakan masalah yang membusukkan seluruh masyarakat, bukan hanya Gereja Katolik. Namun, bahwa pelecehan tersebut terjadi dalam lingkungan Gereja yang menyatakan diri dipanggil untuk hidup suci dan

melindungi mereka yang lemah, hal itulah skandal yang begitu memukul Gereja.

Yang membuat kaget, malu, dan semakin marah bukan hanya kasus-kasus pelecehan itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa di mana-mana para atasan yang bersangkutan—uskup-uskup, vikaris jenderal, rektor kolese, para provinsial dan lain-lain—menutup-nutupi kasus itu. Sering seorang pelaku hanya dipindahkan, dan di tempat baru melakukan pelecehan baru. Yang sama sekali tidak diperhatikan adalah para korban. Itulah skandal terbesar. Yang diperhatikan Gereja bukan para korban yang sering mengalami luka psikis mendalam, melainkan hanya bagaimana agar jangan sampai hal itu diketahui; jadi jangan sampai nama Gereja kena cemar. Bahwa Gereja tidak memerhatikan para korban merupakan dosa yang paling besar dalam skandal pelecehan ini.

Tahun 2018 dipublikasikanlah “Studi MHG”, penelitian independen yang dipesan oleh Konferensi para Uskup Jerman. Studi itu menghitung antara 1946 dan 2014, ada 3688 korban pelecehan seksual oleh pastor atau biarawan. Diperkirakan bahwa empat persen dari semua imam pernah melakukan pelecehan seksual. Hasil Studi MHG lainnya juga lebih mengguncangkan Gereja, yaitu bahwa jumlah umat Katolik yang meninggalkan Gereja tahun lalu mencapai 250.000 orang. Di sini dapat pula disebut hasil penelitian yang dipesan Uskup-uskup Prancis, yang baru diumumkan setengah tahun lalu. Studi itu memperkirakan—berdasarkan proyeksi kasus-kasus yang diselidiki—bahwa sejak 1950, ada 216.000 orang di bawah umur menjadi korban pelecehan seksual oleh hampir 3000 imam dan biarawan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Dua catatan perlu mendapat perhatian di sini. *Pertama*, kebanyakan ahli berpendapat bahwa di negara-negara yang belum melakukan penelitian seperti itu kasus pelecehan tidak akan kurang. *Kedua*, dalam masyarakat umum, persentase pelecehan seksual terhadap orang di bawah umur diperkirakan malah lebih besar, terutama dalam keluarga sendiri, lalu di lembaga-lembaga pendidikan, di kelab-kelab olahraga, dan sebagainya.

Skandal pelecehan seksual itulah yang membuat suatu usaha reformasi Gereja Katolik tidak dapat dielakkan lagi. Pelecehan itu dilakukan terutama oleh imam-imam, laki-laki terahbis Tuhan. Ada yang melakukannya dalam rangka pemberian Sakramen Pengakuan. Yang amat mengerikan, yaitu bahwa yang melakukannya adalah laki-laki yang hidup dalam selibat; jadi orang-orang yang berjanji tidak mengaktifkan seksualitas mereka, yang atas nama Gereja mempermauklumkan suatu etika seksual di mana masturbasi saja disebut dosa berat. Laki-laki itulah yang melakukan pelecehan, dengan 80 persen korban adalah anak dan pemuda—hal itu berbeda dengan pelecehan dalam masyarakat pada umumnya. Apalagi para pelecch terahbis dilindungi oleh laki-laki terahbis lain, para uskup, yang hanya terdorong oleh keinginan agar nama Gereja jangan jatuh. Mereka lantas membungkam segenap pertanyaan dari umat yang mempersoalkan selibat dan etika seksual resmi Gereja. Itulah yang memberi kesan kemunafikan mendalam kepada Gereja Katolik dengan ajarannya tentang selibat, pembatasan imamat pada laki-laki, dan penolakan terhadap kasih serta seksualitas orang-orang homoseksual.

Sudah jelas, Gereja Katolik Jerman—dan tentu saja bukan hanya Gereja Jerman—berada dalam krisis yang serius. Krisis itulah yang melatarbelakangi lahirnya Jalan Sinodal, yang dibuka dan sedang dijalani oleh Gereja Jerman. Gereja Jerman yakin bahwa hanya dengan sikap yang betul-betul terbuka dan jujur, dengan mempertanyakan struktur-struktur kekuasaan serta tradisi-tradisi yang melatarbelakangi kebusukan dan kemunafikan Gereja itu, Gereja dapat kembali menjalankan panggilannya, memancarkan kekuatan dan keindahan Injil ke dalam masyarakat. Pada titik ini, harapan uskup-uskup yang mengkritik Jalan Sinodal agar Gereja Jerman fokus pada membawa kabar Injil daripada memikirkan kembali ajaran-ajaran tradisional Gereja kelihatan amat sangat tidak memadai.

Sebelum masuk ke dalam Jalan Sinodal Jerman, mari kita melihat apa itu sinode.

### Sinode para Uskup dalam Gereja

Dalam Gereja Katolik, sinode-sinode uskup-uskup—jadi pertemuan beberapa uskup untuk membicarakan masalah bersama—sudah umum dilakukan sejak abad-abad pertama. Baru pada abad XIX, ketika Gereja Katolik mengambil jalan memajukan monarki paus yang mutlak, sinode-sinode tidak lagi diadakan. Namun, Konsili Vatikan II mendukung agar Sinode para Uskup dihidupkan kembali (*Christus Dominus* 5). Sejak itu, Roma secara teratur menyelenggarakan sinode uskup. Sinode itu lalu menghasilkan *paper* atau rekomendasi yang diserahkan kepada paus. Kemudian, paus menulis surat tentang bagaimana beliau menyikapi hasil-hasil sinode.

Paus Fransiskus adalah figur yang sangat menegaskan bahwa sinode dalam Gereja harus memainkan peran yang besar. Bagi Fransiskus, sinode adalah salah satu tempat di mana *sensus fidelium*, roh iman para beriman, dapat diungkapkan. Di bawah pimpinan Fransiskus sampai sekarang sudah diadakan tiga sinode para uskup. Sinode 2014 tentang keluarga yang hasilnya dipermauklumkan oleh Fransiskus dalam Seruan Apostolik *Amoris Laetitia*. Lalu, Sinode 2018 adalah tentang *Orang Muda, Iman, dan Panggilan*. Kemudian, pada Oktober 2019, Fransiskus mengumpulkan sinode uskup di Roma, untuk membahas tentang Amazonas, dan yang membuahkan dokumen "Jalan-Jalan Baru bagi Gereja dan Ekologi Utuh".

Untuk Sinode para Uskup 2023, Fransiskus menetapkan tema, "Suatu Gereja Sinodal: Komunitas, Partisipasi, Misi". Itulah sinode besar yang sekarang sudah dalam persiapan di keuskupan-keuskupan. Pokok bahasan sinode yang akan datang itu adalah justru struktur sinodal Gereja. Fransiskus ingin supaya seluruh Gereja, jadi seluruh umat, dilibatkan. Hal itu



selaras dengan kata "sinode", yang berarti "berjalan bersama". Hal itu jugalah yang dimaksud oleh Paus Fransiskus: berjalan bersama dan mendengarkan Roh Kudus. Dalam kerangka ini, Sinode para Uskup ke-16 tersebut akan berbeda dari semua sinode sebelumnya. Sebab, proses sinode akan dimulai pada Oktober yang lalu dengan seluruh umat beriman, terutama kaum awam, diajak saling mendengarkan. Tahap selanjutnya terjadi pada tingkat keuskupan dan berlangsung sampai April 2022. Kemudian, masih akan ada tahap "continental" (benua), yang diharapkan berpuncak pada tahap akhir, yaitu Sinode para Uskup di Roma, pada Oktober 2023.

Jalan Sinodal Jerman sebenarnya sangat cocok dengan gagasan di balik sinode para uskup tentang Gereja sinodal yang digerakkan oleh Paus Fransiskus. Namun, ketegangan boleh jadi akan timbul. Hal itu mengingat bahwa Paus Fransiskus tidak kelihatan ingin berfokus pada pokok-pokok tertentu dalam ajaran Gereja, sedangkan persis poin itulah yang sudah terjadi di Jalan Sinodal Jerman. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya.

### Jalan Sinodal Umat Katolik Jerman

Pada 25 September 2018, hasil-hasil penelitian MHG tentang pelecehan seksual dipresentasikan kepada Konferensi para Uskup Jerman di Fulda. Hasil-hasil tersebut dianggap amat mengerikan. Oleh karena itu, dalam pertemuan pada Maret 2019, uskup-uskup Jerman memutuskan untuk menjalankan suatu "Jalan Sinodal" bersama Komite Sentral Umat Katolik Jerman, guna membahas masalah-masalah yang dianggap mendesak; dan dengan demikian memperoleh kembali kepercayaan umat Katolik Jerman. Istilah "Jalan Sinodal", bukan "sinode", dipilih karena "sinode" harus menaati sekian peraturan hukum kanonik. Padahal, para Uskup Jerman ingin bebas. Untuk itu, hasil Jalan Sinodal akan dianggap "*verbindlich*",

"mengikat". Namun, "mengikat" dalam arti apa, masih tidak begitu jelas. Yang jelas, apa yang diputuskan oleh Jalan Sinodal itu harus disetujui oleh dua pertiga para Uskup Jerman dan hal-hal yang menyangkut ajaran Katolik tak bisa diputuskan oleh Gereja Katolik Jerman, melainkan harus diputuskan oleh seluruh Gereja, dan hal itu berarti harus disetujui oleh paus.

Ada empat pokok yang diputuskan akan dibicarakan, dan kelihatan berpotensi menjadikan Jalan Sinodal sebagai sumber kontroversi. Berikut empat pokok tersebut.

- a. Konsentrasi kekuasaan dalam Gereja harus dibongkar.
- b. Pola kehidupan para uskup dan imam perlu diubah supaya dapat memperlihatkan kebebasan batin berdasarkan iman serta orientasi pada contoh Yesus Kristus.
- c. Moralitas seksual sudah ketinggalan zaman.
- d. Peran perempuan dalam Gereja.

Karena wabah Covid-19, Jalan Sinodal agak terhambat. Dalam sidangnya pada permulaan Oktober 2021, mayoritas para anggota mendukung—tetapi belum memutuskan—enam pernyataan berikut.

- a. Vatikan diminta mengizinkan agar perempuan bisa ditahbiskan menjadi imam.
- b. Kaum awam perlu diberi lebih banyak pengaruh atas pemilihan para uskup mereka.
- c. *Homosexual partnerships* harus boleh diberi pemberkatan gerejani resmi.
- d. Ajaran tentang etika seksual dalam Katekismus Katolik Roma perlu dibarui. Hubungan seks dalam *same-sex unions/partnerships* harusnya secara teologis diterima dan jangan dicap sebagai dosa.

- e. Imamat dibuka juga bagi orang yang telah menikah.
- f. Undang-Undang Jerman yang mengizinkan bahwa orang yang nikah sejenis diberhentikan dari pekerjaan dalam organisasi gerejani harus diubah.

### Jalan Sinodal, Menuju Perpecahan Gereja?

Daftar keenam tuntutan di atas mengungkapkan secara tersirat bahwa Jalan Sinodal Jerman memuat bahan peledak dalam Gereja Katolik. Butir f tentang undang-undang kerja Jerman dapat kita kesampingkan. Demikian pula, tuntutan agar kaum awam dilibatkan dalam pemilihan uskup merupakan sesuatu yang barangkali secara luas didukung dalam Gereja dan pernah menjadi sesuatu yang biasa. Praktik sekarang bahwa *nuncio* saja yang menjaring informasi tentang calon-calon uskup dan menyampaikannya ke Roma sama sekali tidak masuk akal serta jelas bertentangan dengan keterbukaan Paus Fransiskus. Seharusnya, calon uskup baru dicari oleh suatu panitia dalam keuskupan yang bersangkutan, kemudian diputuskan dalam konferensi para uskup setempat, dan kemudian hasilnya dikirim sebagai rekomendasi ke Roma, di mana keputusan akhir tetap di tangan Paus.

Tuntutan bahwa kekurangan imam perlu ditanggapi dengan memungkinkan adanya imam yang nikah pun secara teologis tidak bermasalah. Tidak ada teolog dan tidak ada paus, yang menyangkal bahwa selibat wajib para imam merupakan hukum Gereja dan belum berumur seribu tahun. Di dalam lingkup Gereja Katolik sendiri, Gereja-Gereja di luar ritus Roma mempunyai imam yang menikah. Bahkan, sejak Paus Pius XII, pastor Protestan yang menjadi Katolik dan ditugasi melanjutkan karya sebagai pastor—sesudah persiapan seperlunya—tidak diharuskan tidak berkeluarga. Ada sekitar seratus imam ritus Katolik Roma yang resmi hidup dalam pernikahan. Di lain

pihak, harapan sinode Amazonas agar kekurangan imam amat serius di wilayah Amazonas—karena kekurangan imam, misa di banyak umat hanya dapat dirayakan dua tiga kali setahun—diatasi dengan mengizinkan menahbiskan *virii probati* lokal oleh Paus Fransiskus didiamkan saja.

Yang betul-betul memuat bahan peledak adalah dua tuntutan berikut: agar perempuan dapat ditahbiskan imam; dan agar hubungan seks sejenis tidak lagi dianggap dosa sehingga pasangan homoseks—meskipun tidak akan diakui sebagai perkawinan—namun dapat diberikan berkat Katolik resmi.

#### 1. Seks antarmanusia homoseksual

Mengenai hubungan seks antara orang-orang sejenis, perbedaan pendapat sekarang sudah menjadi resmi. Pada 15 Maret 2021, Kardinal Ladaria, Ketua Kongregasi Iman Vatikan, tidak tanpa persetujuan Paus Fransiskus, menyatakan bahwa Gereja Katolik tidak berkuasa untuk memberkati persatuan-persatuan homoseksual (*"the Catholic Church does not have the power to bless same-sex unions despite their 'positive elements', because it is impossible for God to bless sin"*). Sikap Paus Fransiskus sendiri sebetulnya tidak seratus persen jelas karena dalam sebuah film yang diluncurkan pada Oktober 2020, beliau mengatakan bahwa orang-orang homoseksual harusnya dilindungi oleh undang-undang (negara), *"Homosexual people have a right to be in a family. They are children of God and have a right to a family. Nobody should be thrown out or be made miserable over it"* (film dokumenter *"Francesco"* yang dibuat oleh *Evgeny Afineevsky*).

Namun, pada 30 Maret (2022) lalu, Kardinal Reinhart Marx—yang permintaannya untuk boleh mengundurkan diri pada tahun sebelumnya ditolak Paus Fransiskus—dalam suatu misa khusus bagi kaum *Queer* berbicara jelas, "Homoseksualitas bukan dosa .... Bagi saya yang dosa itu sebenarnya kalau

orang-orang yang berbeda mau didesak keluar dari Gereja.” Marx mengusulkan suatu “etika inklusif”. Dan ia mencatat, “Katekismus (Roma Katolik) tidak ditulis pada batu. Apa yang ada di dalamnya boleh diragukan. Saya bicara tentang primat kasih, justru dalam hubungan seks.” Dan Marx menegaskan bahwa semua hubungan yang mengikuti “primat kasih” bisa diterima oleh Allah. “Masak kamilah yang bisa mengarahkan dan menetapkan dengan persis siapa boleh mengatakan kepada siapa ‘aku cinta padamu?’” Marx mengatakan bahwa ia mengharapkan “suatu Gereja yang merangkul”.

Sudah jelas, posisi Kardinal Marx—yang juga merupakan posisi mayoritas besar uskup-uskup Jerman—adalah sesuatu yang revolusioner dalam ajaran Gereja. Sampai sekarang Gereja mengajarkan bahwa hanya hubungan seks antara suami dan istri yang hidup dalam perkawinan sah bukan dosa berat. Hubungan homoseksual dianggap “melawan kodrat”. Suatu perubahan memang sudah mulai di bawah Paus Yohanes Paulus II. Beliau menegaskan bahwa kecenderungan homoseksual bukanlah dosa, melainkan kenyataan alami, dan bahwa orang-orang homoseksual tidak kurang manusia daripada orang lain. Akan tetapi, Yohanes Paulus II mempertahankan pula ajaran tradisional tentang hubungan seks. Karena itu, menurut beliau, orang homoseksual tidak boleh melakukan hubungan seks.

Ucapan Kardinal Marx menunjukkan sesuatu yang amat penting. Uskup-uskup yang mengungkapkan kekhawatiran mereka (yang telah disebut pada permulaan) sungguh keliru kalau mengira bahwa perubahan sikap terhadap kaum homoseksual di kalangan Katolik merupakan sekadar penyesuaian dengan semangat zaman, semangat kaum *hippies* dan *sexual revolution*, seakan-akan sekadar tidak mau ketinggalan zaman. Dalam surat jawaban kepada Uskup Agung Samuel Aquila, salah satu konsep-tor surat 70 uskup itu, Mgr. Bätzig, Ketua Konferensi para Uskup Jerman, menyebut insinuasī-insinuasī itu “mengherankan”

(*befremdlich*). “Jalan Sinodal adalah usaha kami untuk membuat pemakluman Kabar Gembira dapat dipercayai lagi .... Tidak ada yang dapat mengatakan bahwa hanya dialah yang mengikuti Roh Kudus atau berhak menyangkal bahwa orang lain pun berusaha mendengarkan Roh Kudus.”

Perubahan dari pengharaman ke sikap positif terhadap kaum homoseksual dan terhadap ungkapan kasih di antara mereka, termasuk pula ungkapan dalam dimensi seksual, terjadi bukan karena mereka yang menuntut perubahan mau mengikuti semangat zaman, melainkan karena mereka yakin bahwa sikap tradisional terhadap kaum homoseksual justru tidak dapat dibenarkan dalam pandangan Tuhan. Bahwasanya, sikap tradisional tak sesuai tuntutan Yesus agar kita jangan berkeras hati dan selalu mencintai, dan bahwa cinta tidak pernah dapat salah karena Allah sendiri adalah Cinta. Jadi, perubahan sikap terhadap kaum homo merupakan pertobatan dalam Gereja, dari suatu jalan yang salah—seperti dahulu dukungan Gereja terhadap hukuman mati dan perang salib merupakan suatu praktik yang salah kaprah. Hal yang sama berlaku bagi tuntutan melawan keyakinan Gereja selama 2000 tahun bahwa pembatasan imamat pada kaum laki-laki tidak dapat dibenarkan dalam pandangan Tuhan.

Kembali ke perkara kasih orang homoseksual, dalam Gereja Katolik pun sebenarnya sudah lama diajukan dua pertanyaan. *Pertama*, atas dasar apa Gereja sampai sekarang mengajarkan bahwa hubungan seks di luar perkawinan, misalnya antara dua mempelai, otomatis merupakan dosa, bahkan dosa berat? Di dalam Kitab Suci tidak ada sepele kata pun tentang hal itu. Perjanjian Baru sama sekali tidak berfokus pada hal seksualitas. Fokus itu baru masuk ke dalam Gereja dari aliran *Gnosis* dan *Manikheisme*, terutama karena pengaruh Santo Agustinus yang memang trauma. *Pertanyaan kedua*, apa alasan yang mendasari orang-orang dengan kecenderungan homoseksual dilarang

mengungkapkan kasih di antara mereka juga secara seksual, sama seperti orang-orang heteroseksual?

Bagi para penganut etika Katolik tradisional, sikap seperti diungkapkan oleh Kardinal Marx, seorang kardinal paling utama dalam Gereja Katolik, merupakan suatu kemurtadan dari iman yang benar. Hal yang sama berlaku pula bagi tuntutan agar sikap tradisional Gereja terhadap seksualitas—segenap nikmat seks di luar antara suami dan istri dalam perkawinan sah adalah dosa berat—dibarui. Tak ada dasar alkitabiah apa pun untuk pandangan tradisional tersebut. Di sini bukan tempat untuk memasuki hal pembaruan etika seksual. Yang kiranya tetap akan menjadi tanda bagi hubungan seks yang positif—artinya sesuai dengan martabat manusia—adalah bahwa di dalam hubungan itu masing-masing mengungkapkan kasih dan sikap saling menghormati disertai tanggung jawab.

## 2. Perempuan ditahbiskan imam?

Di dalam banyak Gereja Protestan, juga dalam Gereja Anglikan Inggris—tetapi tidak dalam Gereja-Gereja Anglikan Afrika, dan karena itu memisahkan diri dari Gereja Anglikan induk mereka—adanya pastor-pastor perempuan sudah menjadi hal biasa sejak sekitar 60 tahun silam. Akan tetapi, Gereja Katolik bersama semua Gereja Ortodoks, jadi semua Gereja yang berasal dari zaman para rasul, tidak pernah menahbiskan perempuan menjadi imam. Apalagi Paus Yohanes Paulus II dalam surat apostolik *Ordinatio Sacerdotalis* (1994) dengan tegas menetapkan bahwa "Gereja tidak mempunyai kuasa apa pun untuk memberikan tahbisan imam kepada kaum perempuan."<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Paus Yohanes Paulus II memberikan tiga dasar bagi penegasannya itu: "Contoh Kristus menurut kesaksian Kitab Suci yang hanya memilih orang laki-laki menjadi rasul, praktik Gereja tanpa interupsi yang mengikuti Kristus dengan secara eksklusif memilih orang laki-laki, dan Jabatan Pengajar (Magisterium) yang tetap menegaskan bahwa pengecualian orang-orang perempuan dari jabatan imam adalah sesuai dengan rencana Allah bagi Gereja-Nya."

Sementara sejak sekitar 20 tahun lalu, Paus diminta untuk mengizinkan agar kaum perempuan dapat menerima tahbisan diakon. Sudah dua kali Paus mengugaskan suatu komisi teologis untuk membicarakan hal itu, tetapi dua kali pula komisi tidak mencapai kesatuan paham dan Paus sendiri tetap diam. Ada memang yang mengharapkan agar tahbisan diakon kepada kaum perempuan menjadi langkah pertama ke arah tahbisan imam bagi kaum perempuan.

Karena itu, kalau sekarang dalam Gereja Katolik Jerman menuntut agar pembatasan imam kepada kaum laki-laki dicabut, bisa dimengerti bahwa ada reaksi keras dari kalangan konservatif di dalam Gereja. Sementara Paus Fransiskus diam, di mana diandaikan bahwa beliau sebenarnya tidak mendukung imam bagi kaum perempuan. Namun, Fransiskus tidak melarang pembicaraan itu dalam Gereja Jerman; situasi itu amat berbeda jika dibandingkan dengan Paus Yohanes Paulus II yang dalam tulisannya juga menuntut agar pembicaraan kemungkinan imam bagi kaum perempuan dihentikan. Dari uskup-uskup Jerman sendiri, suara mayoritas ternyata mendukung kemungkinan imam bagi kaum perempuan.

Meninjau kenyataan di atas, masalah sebenarnya dapat dirumuskan ke dalam dua pertanyaan. *Pertama*, mengapa pembatasan imam pada laki-laki mau diakhiri sesudah 2000 tahun? *Kedua*, bagaimana harapan itu dapat disesuaikan dengan penegasan keras Paus Yohanes Paulus II tadi yang secara resmi, sebagai paus dan guru tertinggi Gereja Katolik, menyatakan bahwa Gereja tidak diberi kuasa untuk mengubah keterikatan imam pada kaum laki-laki?

Uskup-uskup Polandia dan 70 lebih uskup penulis surat kepada Konferensi para Uskup Jerman menginsinuasikan bahwa tahbisan perempuan (dan sikap positif terhadap hubungan seks antarorang sejenis) merupakan suatu penyesuaian terhadap semangat zaman dan ilmu-ilmu sosial-psikologis. Yang dimaksud

dengan penyesuaian terhadap semangat zaman itu, antara lain feminisme yang menuntut—dan berhasil dalam tuntutan—agar diskriminasi terhadap kaum perempuan diakhiri, termasuk pula segala upaya menghalangi posisi kepemimpinan perempuan. Sehubungan dengan itu, kita ingat bahwa di Amerika Serikat, Swiss, dan lain negara, kaum perempuan bahkan pernah tidak boleh ikut dalam pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat di negara mereka. Adapun yang dimaksud dengan penyesuaian terhadap “ilmu-ilmu sosial-psikologis” adalah perjuangan gender, yang oleh Paus Fransiskus pun sudah ditolak. Paham gender meyakini—dan untuk sebagian terbesar tidak terbantah sama sekali—bahwa banyak pandangan tentang apa yang “khas perempuan” dan berbeda dengan yang “khas laki-laki” bukan berdasarkan perbedaan fisiologis—nyata perempuan dari laki-laki (sejauh ini hanya genderisme ekstrem yang menolak perbedaan fisiologis), melainkan berdasarkan *patriarkat*, perwujudan struktur-struktur kekuasaan di mana laki-laki berkuasa. Oleh sebab itu, sekarang kaum perempuan juga boleh main sepak bola.

Maka, amat sangat penting diperhatikan bahwa desakan agar Gereja Katolik mencabut penolakan terhadap tabhisan imam bagi kaum perempuan tidak boleh didasarkan pada semangat zaman atau pertimbangan gender itu, tetapi berdasarkan pertimbangan teologis yang kuat. Kalau pembatasan itu mau dihapus, tentu hanya atas dasar keyakinan bahwa itulah kehendak Allah, yaitu bahwa pembatasan imam pada kelaki-lakian tidak lagi sesuai kehendak Roh Allah. Dalam hal ini, Yesus tidak pernah mengatakan bahwa hanya laki-laki dapat menjadi rasul. Kenyataan juga tidak mengindikasikan bukti kuat bahwa dalam peristiwa Perjamuan Terakhir hanya hadir laki-laki. Bahkan, jika hal itu diandaikan sungguh terjadi, kenyataan tersebut tidak bisa disimpulkan bahwa perempuan tidak bisa menjadi imam. Paus Yohanes Paulus II hanya mempunyai satu argumen pembelaan: tradisi 2000 tahun

Gereja. Jika demikian, dari mana beliau mengambil hak untuk menetapkan bahwa tradisi itu tidak dapat diubah? Kalau Yesus sendiri mengatakan, “Apa yang kalian lepaskan di dunia, akan dilepaskan di surga” (Mat. 18:18), atas dasar apa Paus Yohanes Paulus II mau melarang, kalau Gereja, sesudah 2000 tahun dan banyak perubahan, memutuskan untuk melepaskan keterikatan imam pada kaum laki-laki? Bukankah meneruskan larangan tradisional itu dalam situasi sangat kekurangan imam, dan dalam situasi di mana jelas ada perempuan yang bersedia serta tak diragukan mampu menjadi imam, malah bisa merupakan suatu dosa melawan Roh Kudus? Jadi, masalah itu serius dan murahan kalau dikira sekadar masalah orang mau mengikuti tren modernitas. Semakin banyak orang Katolik, tidak hanya di Jerman, berpendapat bahwa Gereja—yang sudah terguncangkan oleh skandal pelecehan seksual yang dilakukan oleh imam-imam laki-laki itu—akan kehilangan harkat rohani apabila tetap mempertahankan penolakan tabhisan imam bagi perempuan.

Dengan demikian, pertanyaan kedua juga sudah terjawab. Mereka yang, dengan langsung mengabaikan larangan Paus Yohanes Paulus II, tetap mendesak agar imam dibuka bagi kaum perempuan sesungguhnya menolak hak Paus Yohanes Paulus II untuk menetapkan suatu tradisi sebagai tak dapat diubah. Apalagi, tak ada sepele kata pun dari Yesus yang mendukung larangan itu, dan tak ada alasan teologis kuat apa pun mengapa perempuan tidak dapat menjadi imam.

Keputusan Jalan Sinodal Jerman hanya sah apabila mendapat persetujuan dua pertiga uskup-uskup Jerman. Meskipun lebih dari dua pertiga uskup Jerman mendukung pencabutan pembatasan imam pada kaum laki-laki, mereka tidak akan mendukung—jadi tidak akan menyetujui—suatu tuntutan final agar larangan terhadap tabhisan perempuan dicabut. Yang dapat diperkirakan adalah bahwa mereka akan mengajukan permintaan ke Roma agar pencabutan pembatasan imam pada kaum laki-laki dibahas

dalam seluruh Gereja (dan menurut penulis, mengingat tradisi selama 2000 tahun, pencabutan ini harus diputuskan dalam sebuah konsili). Namun, kalau permintaan itu tidak diacuhkan oleh Roma—jadi kalau masalah ini kemudian tidak dibahas, dengan semboyan “tak perlu ditanggapi”—Gereja Katolik Jerman akan mengalami krisis. Bahkan, krisis itu kemungkinan akan lebih besar daripada yang dialami Gereja Belanda 50 tahun lalu; dimulai dari kaum perempuan, Gereja Katolik akan ditinggalkan untuk selamanya oleh kebanyakan anggota Gereja yang masih setia. Mereka tidak akan membentuk Gereja tandingan (seperti 500 tahun lalu di bawah pimpinan Martin Luther), tetapi mereka akan berhenti begitu saja. Yang akan tinggal (dari pernah 40 juta orang Katolik) barangkali dua juta atau paling banyak tiga juta orang yang memang konservatif (yang juga tidak percaya pada Paus Fransiskus). Apakah habisnya Gereja Katolik Jerman mau dibiarkan saja? Dan apakah reaksi itu akan terbatas pada Jerman, Austria, Swiss? Cukup gawat perspektif itu!

### Jalan Sinodal Jerman dan Gereja Katolik

Kesimpulan mana yang dapat ditarik? Tentu saja, sekarang masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan pasti. Hasil Jalan Sinodal Jerman baru akan dirumuskan satu setengah tahun lagi. Bahwa prosesnya belum tentu akan berjalan lancar, bahkan di Jerman sendiri, menjadi jelas pada 8 September 2022 yang lalu. Teks dasar *Jalan Sinodal* tentang moralitas seksual (termasuk pula relasi seksual antara orang-orang sejenis) didukung oleh mayoritas 80 persen peserta, tetapi tidak mencapai 75 persen suara uskup sehingga tidak disahkan. Yang membuat juga beberapa uskup marah adalah bahwa uskup-uskup yang menolak teks yang sudah lama dibicarakan itu tidak angkat bicara, jadi diam saja, tetapi dalam pemungutan suara menolak. Hal itu memperlihatkan bahwa jalan pembaruan dalam Gereja Katolik masih panjang.

Seumpama Jalan Sinodal, dengan dukungan lebih dari dua pertiga uskup Jerman, akhirnya mengajukan hal-hal yang selaras dengan putusan sidang Oktober 2021, yakni dalam bentuk permintaan agar hal-hal itu dibicarakan dalam seluruh Gereja, lalu bagaimanakah kiranya reaksi Paus Fransiskus yang waktu itu sudah akan berumur hampir 87 tahun? Semuanya masih serba terbuka.

Apa yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa apa yang dibicarakan dalam Jalan Sinodal itu tentu juga akan merasuk ke dalam Sinode para Uskup sedunia yang sedang dalam persiapan. Jadi, harapan-harapan Gereja Katolik Jerman akan secara resmi termasuk materi yang akan dibicarakan oleh para uskup dalam sinode mereka tahun depan di Vatikan.

Kita juga tidak tahu bagaimana reaksi Gereja Katolik di lain tempat di dunia. Konferensi para Uskup Polandia dan negara-negara Nordik Eropa memang dikenal dengan karakternya yang konservatif. Mayoritas uskup, dan semua kardinal aktif Gereja Katolik Amerika Serikat sampai saat ini tidak menandatangani surat 70 uskup itu. Kardinal Pell sendiri, seorang penandatanganan dan pendukung surat kritis itu, memperkirakan bahwa sikap Gereja Jerman juga akan mendapat dukungan dari Gereja Australia. Sekarang para uskup di negara-negara lain menunggu perkembangannya.

Yang jelas, kalau tuntutan-tuntutan Jalan Sinodal diabaikan, artinya, sesuai kebiasaan dahulu, didiamkan saja—biarkan orang-orang Jerman ribut, nanti akan tenang kembali—akan terjadi krisis Katolik di Jerman. Dengan skandal pelecehan—skandal bukan khas Jerman, melainkan skandal Gereja Katolik sedunia—kesediaan untuk “menunggu” sulit dapat diharapkan. Gereja Katolik Jerman akan mengalami suatu eksodus. Akan tetapi, sebaiknya kita tunggu dahulu. Masih ada banyak perspektif. Akhirnya, perlu betul-betul kita percaya bahwa Roh Kudus tidak akan membiarkan Gereja Katolik hancur.